

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim dan Problematika Pengembangannya

Nabila Rasha¹, Mikraj²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Iskandar Thani, Aceh, Indonesia*

¹ nabilrashastia@gmail.com, ² mikrajstiei@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim merupakan isu penting dalam pengembangan masyarakat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan sosial. Berbagai konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi telah dikembangkan dalam literatur ekonomi Islam, seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemanfaatan zakat dan wakaf produktif, serta pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Namun, dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim masih menghadapi berbagai problematika yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim serta problematika pengembangannya berdasarkan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik yang relevan dengan ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim memiliki landasan konseptual yang kuat, tetapi masih terkendala oleh kelemahan kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan permodalan, kebijakan yang belum optimal, serta rendahnya literasi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim perlu dikembangkan melalui pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berbasis nilai-nilai Islam agar mampu mendukung pembangunan masyarakat Islam yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pemberdayaan ekonomi, masyarakat Muslim, pengembangan masyarakat Islam

Abstract

Economic empowerment of Muslim communities is an important issue in Islamic community development aimed at achieving welfare, self-reliance, and social justice. Various concepts and strategies of economic empowerment have been discussed in the literature of Islamic economics, including the strengthening of micro, small, and medium enterprises, the utilization of productive zakat and waqf, and the development of Islamic microfinance institutions. However, in practice, the economic empowerment of Muslim communities still faces various challenges that hinder its effectiveness and sustainability. This article aims to examine the concept of economic empowerment of Muslim communities and the problems in its development based on a literature study. The research method used is library research by analyzing books, scholarly journal articles, and academic publications related to Islamic economics and Islamic community development. The results of the study indicate that the economic empowerment of Muslim communities has a strong conceptual foundation, but it is still constrained by institutional weaknesses, low quality of human resources, limited access to capital, suboptimal policies, and low levels of economic literacy. Therefore, the economic empowerment of Muslim communities needs to be strengthened through a holistic, integrated, and value-based approach to support sustainable Islamic community development.

Keywords : Economic empowerment, Muslim community, Islamic community development.

Pendahuluan

Kondisi ekonomi masyarakat Muslim hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural dan kultural yang belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi problem yang sering ditemukan dalam berbagai kajian pengembangan masyarakat Islam. Persoalan-persoalan tersebut selain berdampak pada aspek kesejahteraan material, juga memengaruhi kualitas kehidupan sosial, pendidikan, dan keberlanjutan pembangunan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim menjadi salah satu pendekatan strategis yang banyak dikaji sebagai solusi atas persoalan tersebut. Pemberdayaan ekonomi dimengerti sebagai upaya peningkatan pendapatan serta proses penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi ekonomi secara mandiri (Diatmika & Rahayu, 2022 dan Masmuroh, 2023). Dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan ekonomi memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat (*falāḥ*) dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi global yang terus berkembang. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta perubahan struktur sosial menuntut masyarakat untuk memiliki daya saing dan kemampuan adaptasi yang memadai. Namun, pada kenyataannya, sebagian masyarakat Muslim masih berada pada posisi ekonomi yang lemah dan rentan. Keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi ekonomi dan keuangan, serta lemahnya kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang memperlambat proses pemberdayaan (Kebubun, 2024). Dalam kondisi demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi keharusan dalam upaya membangun masyarakat Islam yang mandiri dan berdaya.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dapat dilakukan melalui beragam strategi, seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan zakat, infak, dan wakaf secara produktif, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, serta optimalisasi peran institusi sosial keagamaan (Cantika, 2015; Hendismi, 2024; Rasha & Suwar, 2025; Wulandari et al., 2025, Syahputra, 2025). Konsep-konsep tersebut telah banyak dikaji dan dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat. Namun demikian, implementasi konsep pemberdayaan ekonomi

tersebut dalam praktik sering kali menghadapi berbagai kendala dan problematika yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim tidak cukup hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Problematika dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim muncul dari berbagai aspek. Dari sisi kelembagaan, masih terdapat lemahnya koordinasi antar lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi. Dari sisi sumber daya manusia, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan ekonomi masyarakat menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan dan lemahnya dukungan kebijakan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program pemberdayaan ekonomi (Rizka & Salabi, 2025; Setyawan et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Upaya pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut penguatan struktur sosial, kelembagaan, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran utuh mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim sekaligus mengidentifikasi berbagai problematika yang menghambat pengembangannya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim serta problematika pengembangannya berdasarkan studi pustaka. Melalui kajian literatur yang relevan, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai pemberdayaan ekonomi dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, sekaligus menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim serta problematika pengembangannya (Luthfiyah, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam berbagai perspektif teoretis dan konseptual yang berkembang dalam kajian ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Metode ini dianggap relevan karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap gagasan dan temuan ilmiah yang telah dipublikasikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Data tersebut meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta publikasi lain yang membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim, ekonomi Islam, dan pengembangan masyarakat Islam. Literatur yang digunakan mencakup sumber nasional maupun internasional yang memiliki kredibilitas akademik. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kedalaman pembahasan, serta kontribusinya terhadap kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan membaca berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, literatur tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep pemberdayaan ekonomi, strategi pengembangan, serta problematika yang dihadapi dalam implementasinya. Proses ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dalam berbagai perspektif.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep, temuan, dan pandangan para ahli yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Melalui analisis ini, peneliti menginterpretasikan berbagai gagasan dan temuan tersebut untuk mengidentifikasi pola, persamaan, serta perbedaan pandangan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dan problematika pengembangannya. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembahasan untuk memberikan pemahaman konseptual yang sistematis dan terintegrasi.

Hasil dan Pembahasa

A. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim merupakan konsep yang berkembang dari pemikiran pengembangan masyarakat dan ekonomi Islam. Secara umum, pemberdayaan ekonomi dimaknai sebagai proses meningkatkan kemampuan individu dan kelompok masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara mandiri (Fuaidi, 2024; Sany, 2019). Dalam konteks masyarakat Muslim, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga diarahkan pada penguatan nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama.

Dalam literatur ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengangkat kondisi ekonomi umat dari ketergantungan menuju kemandirian. Pemberdayaan ini mencakup penguatan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki

peran penting dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara adil dan amanah.

Tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata. Kesejahteraan dalam Islam tidak semata-mata diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang layak, berkeadilan, dan bermartabat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat Muslim.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Keadilan dalam konteks ini berarti adanya distribusi sumber daya ekonomi yang proporsional dan kesempatan yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Pemberdayaan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai etis dan moral yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

Selain keadilan, prinsip kemandirian juga menjadi pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Dalam literatur pengembangan masyarakat Islam, kemandirian dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk membangun kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki.

Prinsip kesejahteraan sosial melengkapi konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim harus mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pengembangan masyarakat Islam.

B. Bentuk dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim

Berbagai literatur ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat Islam mengemukakan sejumlah bentuk dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim yang dapat diterapkan secara konseptual (Sukri, 2025). Salah satu bentuk yang banyak dibahas adalah penguatan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM dipandang sebagai sektor strategis karena memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat (Arinda Devi, 2025; Firmansyah, 2022). Dalam konteks masyarakat Muslim, penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga diarahkan agar aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim juga banyak dikaitkan dengan pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat produktif. Zakat produktif dipahami sebagai pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Dalam literatur, zakat produktif dipandang sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi karena mampu menjembatani kepentingan sosial dan ekonomi secara simultan. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat.

Selain zakat, wakaf produktif juga menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim yang banyak dibahas dalam kajian literatur. Wakaf produktif dipahami sebagai pengelolaan aset wakaf yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat (Rahman, 2025). Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi dan sosial tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf itu sendiri.

Lembaga keuangan mikro syariah juga menempati posisi penting dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim (Ayunda et al., 2025). Lembaga ini dipandang sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu memberikan layanan keuangan yang adil dan inklusif, serta mendorong aktivitas ekonomi produktif di tingkat masyarakat. Dalam literatur, keberadaan lembaga ini sering dikaitkan dengan upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Peran lembaga sosial keagamaan juga menjadi bagian integral dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga seperti masjid, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial Islam dipandang memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat. Kedekatan ini menjadikan lembaga sosial keagamaan memiliki potensi besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi. Secara konseptual, sinergi antara lembaga ekonomi dan lembaga sosial keagamaan dipandang sebagai strategi penting dalam membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim yang berkelanjutan.

C. Problematika Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim

Meskipun konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim telah banyak dikembangkan dalam berbagai literatur ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat, implementasinya masih menghadapi beragam problematika yang kompleks. Problematika ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan, sehingga sering kali menghambat efektivitas pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh. Kajian literatur menunjukkan bahwa kegagalan atau keterbatasan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya konsep, melainkan oleh berbagai hambatan struktural dan kultural yang belum teratasi secara sistematis.

Salah satu problematika utama terletak pada aspek kelembagaan. Banyak literatur menyoroti lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola dan mengoordinasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim (Guntoro & Ahmad, 2022; Shafira et al., 2024; Yusuf, 2024). Kelembagaan yang terlibat sering kali berjalan secara parsial, kurang terintegrasi, dan belum memiliki tata kelola yang kuat. Akibatnya, program pemberdayaan ekonomi cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Lemahnya sinergi antar lembaga ekonomi, lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah juga menjadi faktor yang memperlemah dampak pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat.

Problematika berikutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Literatur menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan kapasitas manajerial masyarakat menjadi hambatan serius dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi. Meskipun berbagai program telah dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, keterbatasan kemampuan dalam mengelola usaha, memahami pasar, dan mengadopsi inovasi sering kali menyebabkan program tersebut tidak berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim tidak cukup hanya dengan menyediakan akses ekonomi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Aspek permodalan juga menjadi problematika yang banyak dibahas dalam kajian literatur. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang adil dan terjangkau menyebabkan masyarakat sulit mengembangkan kegiatan ekonomi produktif (Shafira et al., 2024). Meskipun instrumen keuangan Islam seperti zakat produktif, wakaf produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah telah dikembangkan, pemanfaatannya masih belum optimal. Literatur mencatat bahwa lemahnya sistem pengelolaan, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta keterbatasan jangkauan lembaga keuangan syariah menjadi faktor yang membatasi peran permodalan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim.

Selain itu, problematika kebijakan turut memengaruhi efektivitas pemberdayaan

ekonomi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sering kali belum sepenuhnya berpihak pada penguatan ekonomi umat. Kebijakan yang bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung menghasilkan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dalam konteks ini, kebijakan yang tidak terintegrasi dengan prinsip pengembangan masyarakat Islam berpotensi menjadikan pemberdayaan ekonomi hanya sebagai agenda administratif, bukan sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

Rendahnya literasi ekonomi masyarakat juga menjadi problematika krusial dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi, pengelolaan keuangan, dan nilai-nilai ekonomi Islam masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit memanfaatkan peluang ekonomi yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Rendahnya literasi ekonomi juga berdampak pada minimnya kesadaran akan pentingnya perencanaan ekonomi jangka panjang, sehingga pemberdayaan ekonomi sering kali tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

Berbagai problematika tersebut secara keseluruhan menghambat efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim. Pemberdayaan yang seharusnya mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sering kali terjebak pada pendekatan yang bersifat parsial dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami problematika ini dalam kerangka pengembangan masyarakat Islam yang holistik.

D. Analisis dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam

Dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim tidak dapat dipahami secara sempit sebagai upaya peningkatan aspek material semata. Pengembangan masyarakat Islam menekankan pendekatan holistik yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, problematika pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim perlu dianalisis dengan mempertimbangkan keterkaitan antar dimensi tersebut. Analisis ini menjadi penting agar pemberdayaan ekonomi tidak kehilangan orientasi nilai dan tujuan dasarnya.

Salah satu kelemahan mendasar dalam praktik pemberdayaan ekonomi adalah kecenderungan pendekatan yang terlalu teknokratis dan materialistik (Diatmika & Rahayu, 2022). Dalam banyak kasus, pemberdayaan ekonomi dipahami sebatas peningkatan pendapatan atau produktivitas ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Perspektif pengembangan masyarakat Islam menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan etika Islam. Tanpa

integrasi nilai-nilai tersebut, pemberdayaan ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan baru dan melemahkan kohesi sosial masyarakat.

Problematika kelembagaan dan sumber daya manusia yang telah diuraikan sebelumnya juga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pemberdayaan ekonomi dan pendekatan pengembangan masyarakat Islam. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan seharusnya bersifat partisipatif dan berbasis pada potensi lokal masyarakat. Namun, banyak program pemberdayaan ekonomi yang masih bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengembangan masyarakat Islam yang menekankan partisipasi aktif, kemandirian, dan tanggung jawab kolektif.

Dari sisi permodalan dan kebijakan, analisis dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai sarana transformasi sosial. Zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah sering kali diperlakukan sebagai instrumen teknis, bukan sebagai bagian dari sistem pemberdayaan yang terintegrasi. Padahal, dalam kerangka pengembangan masyarakat Islam, instrumen-instrumen tersebut memiliki fungsi strategis untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Ketidakterpaduan ini menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim.

Selain itu, rendahnya literasi ekonomi masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan yang bersifat edukatif dan transformatif. Pengembangan masyarakat Islam menempatkan pendidikan dan pembentukan kesadaran sebagai fondasi utama pemberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi seharusnya tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai ekonomi Islam, tanggung jawab sosial, dan pentingnya keberlanjutan. Tanpa pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi berisiko menjadi kegiatan simbolik yang tidak menghasilkan perubahan struktural.

Dengan demikian, analisis problematika pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan material dan spiritual secara seimbang. Pendekatan ini menuntut sinergi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam agar pemberdayaan ekonomi benar-benar mampu memandirikan masyarakat dan mewujudkan pembangunan masyarakat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi

masyarakat Muslim merupakan konsep strategis dalam pengembangan masyarakat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Berbagai bentuk dan strategi pemberdayaan, seperti penguatan UMKM, pemanfaatan zakat dan wakaf produktif, lembaga keuangan mikro syariah, serta peran lembaga sosial keagamaan, menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi memiliki basis konseptual yang kuat dalam literatur ekonomi Islam dan pengembangan masyarakat Islam.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Problematika tersebut meliputi kelemahan kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses permodalan, kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung, serta rendahnya literasi ekonomi masyarakat. Kendala-kendala ini menyebabkan pemberdayaan ekonomi sering kali belum mampu menghasilkan dampak yang optimal dan berkelanjutan. Dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pemberdayaan yang ideal dan praktik pemberdayaan yang terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim melalui pendekatan konseptual yang lebih holistik dan terintegrasi. Pemberdayaan ekonomi perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan aspek material, tetapi juga untuk memperkuat dimensi sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam. Sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi ekonomi, serta optimalisasi instrumen ekonomi Islam menjadi rekomendasi konseptual penting untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim di masa mendatang. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis nilai, pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Islam yang mandiri dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Arinda Devi. (2025). *Dinamika Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pertanian Singkong Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/40126/>

Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran Lembaga Keuangan

- Mikro Syariah (Lkms) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043–1052. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.22219/jibe.v6i1.2269>
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Firmansyah, R. (2022). *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara) [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]*. <https://repository.radenintan.ac.id/18214/>
- Fuaidi, I. (2024). Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 95–108. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128>
- Guntoro, S., & Ahmad. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–127. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10044](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044)
- Hendismi, H., Al Fairusy, M., & Ramli, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dan Gereja Studi Kasus Aceh Barat dan Tana Toraja. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 6(2), 91-103. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v6i2.706>
- Kebubun, R. J. M. (2024). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Di Daerah Tertinggal. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 11384–11395. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2729>
- Luthfiah, M. F. &. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Masmuroh, M., Sukri, S., Ramli, R., & Meriza, I. (2023). Strategi Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hikmah Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 59-73. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.11868>
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743–2756. <https://doi.org/10.63822/q02yx266>

- Rasha, N., & Suwar, A. (2025). Konsep Etika Bisnis Islam dalam Penguatan UMKM: Relevansi, Tantangan, dan Model Implementasi. *Al-Ukhwah - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 96–113. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i1.5883>
- Rizka, R. N., & Salabi, A. S. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendidikan Kewirausahaan di Dayah Nurul Huda Aceh Utara: Implementasi, Tantangan, dan Strategi Pengembangan. *Pase: Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 58–75. <https://doi.org/10.47766/pase.v3i2.1227>
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Shafira, S. D. S., Hasan, A., Azfa, N., Nurainuniisa4, S., & Faturrahman. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 34–53. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2024.v5i1.34-53>
- Sukri, S., Ramli, R., Abdi, K., & Ruslan, R. (2025). Pengembangan Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama di Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Aceh Tenggara. *Al-Ukhwah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 84-95. DOI: <https://doi.org/10.47498/jau.v4i1.5587>
- Syahputra, Andi, et al. "Peningkatan Kapasitas Mahasiswa PPMI STAIN Meulaboh dalam Menyusun Jurnal Pengabdian Berbasis Laporan PPL Mikro Dan Makro." *Abdi Makarti* 4.2 (2025): 97-105. <http://dx.doi.org/10.52353/abdimakarti.v4i2.875>.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>
- Yusuf, R. (2024). *Analisis Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Kampung Wisata Di kelurahan Eka Jaya* [Other, UNIVERSITAS JAMBI]. <https://repository.unja.ac.id/>